

Hari/Tanggal : Jumat/27 Oktober 2023

Waktu : 10.00 WITA – Selesai

**Tempat : Ruang Rapat Departemen
Ilmu Sejarah**

IRIGASI BANTIMURUNG DI KABUPATEN MAROS

TAHUN 1975 - 1995



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Hasanuddin

Disusun Oleh:

USMAN SALAM

Nomor Pokok: F061181301

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Sesuai dengan surat penugasan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Nomor : 1165/UN4.9/KEP/2022

Tanggal : 23 Juni 2022

Nama Mahasiswa : Usman Salam

NIM : F061181301

Menyetujui skripsi ini, untuk diteruskan kepada Tim Penguji di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Makassar, 04 Oktober 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum
NIP. 197811202008122002

A. Lili Evita, S.S., M.Hum
NIP. 199001112019032017

Disetujui untuk diteruskan
kepada Panitia Ujian Skripsi
Dekan
u.b. Ketua Departemen Ilmu Sejarah

Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP. 19760827 200801 1 011

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : IRIGASI BANTIMURUNG DI KABUPATEN MAROS
TAHUN 1975 - 1995
Nama Lengkap : Usman Salam
NIM : F061181301

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 27 Oktober 2023 dan dinyatakan sah memenuhi syarat untuk lulus pada program sarjana di Departemen Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin.

Konsultan I


Konsultan II

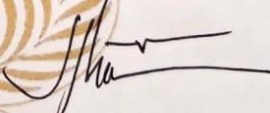

Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum
NIP. 197811202008122002


A. Lili Evita, S.S., M.Hum
NIP. 199001112019032017

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin

Ketua Departemen
Ilmu Sejarah


Prof. Dr. Akin Djalil, M.A
NIP. 19640716 199103 1 010


Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP. 19760827 20080 11 011

HALAMAN PENERIMAAN

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Jumat Tanggal 27 Oktober 2023, panitia ujian skripsi menerima dengan baik skripsi mahasiswa atas nama;

Nama : Usman Salam


NIM : F061181301

dengan judul:

IRIGASI BANTIMURUNG DI KABUPATEN MAROS TAHUN 1975 – 1995

yang telah diajukan dan dipertahankan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra (S.S) Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Makassar, 27 Oktober 2023

- 
1. Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum Ketua : 1
 2. A. Lili Evita, S.S., M.Hum Sekretaris : 2
 3. Dr. Nahdia Nur, M.Hum Penguji I : 3
 4. Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag Penguji II : 4
 5. Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum Pembimbing I : 5
 6. A. Lili Evita, S.S., M.Hum Pembimbing II : 6

HALAMAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS DAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Usman Salam

NIM : F061181301

Departemen : Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

IRIGASI BANTIMURUNG DI KABUPATEN MAROS TAHUN 1975 – 1995

Merupakan skripsi yang telah saya susun untuk memenuhi salah satu syarat lulus dan memperoleh gelar akademik di Universitas Hasanuddin. Seluruh sumber yang digunakan baik yang dikutip maupun dirujuk telah diperiksa dan saya nyatakan benar sesuai dengan kaidah dalam penulisan karya ilmiah yang berlaku. Semua sumber yang digunakan dan dirujuk secara langsung dalam tulisan telah dicantumkan ke dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat unsur plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku, sesuai dalam aturan yang telah ditetapkan di Universitas Hasanuddin.

Makassar, 27 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Usman Salam

NIM: F061181301

(Halaman ini diberikan pada saat mahasiswa telah disetujui oleh Penguji dan PA untuk **JUDISIUM**, dokumen ini dapat diberikan oleh salah satu panitia ujian skripsi sebaiknya Penguji I, sesuai SK atau diminta kepada Kepala Sekretariat Departemen Ilmu Sejarah. Dokumen surat pernyataan ini wajib disematkan dan ditandatangani di atas materai yang kemudian disetorkan ke Universitas Hasanuddin dan perpustakaan dalam lingkup FIB). Dokumen Asli yang telah dijilid diserahkan ke Departemen Ilmu Sejarah.

Dokumen asli terdiri dari

1. Halaman Persetujuan (merupakan halaman persetujuan dari Pembimbing I dan 2 untuk diujikan, yang diketahui oleh Ketua Departemen Ilmu Sejarah)
2. Halaman Penerimaan (merupakan halaman penerimaan panitia ujian skripsi yang terdiri dari ketua, sekretaris, penguji 1, penguji 2, pembimbing 1 dan pembimbing 2) halaman penerimaan ini ditandatangani pada saat judisium
3. Halaman Pengesahan (merupakan halaman pengesahan yang ditandatangani oleh Pembimbing I dan Pembimbing 2, Ketua Departemen Ilmu Sejarah, beserta Dekan) halaman pengesahan ini ditandatangani setelah ujian judisium.
4. Surat Pernyataan Orisinilitas dan Bebas Plagiarism

KATA PENGANTAR

Segala Puja dan Puji hanya untuk Allah SWT, atas seluruh rahmat, berkat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Irigasi Bantimurung di Kabupaten Maros Tahun 1975-1995”. Sebagai salah satu syarat menyanggah gelar Sarjana. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW *Allahumma Shalli Alaa Muhammad*, nabi dan rasul penutup yang senantiasa menyebarkan ajaran tauhid dan kebaikan serta membawa ajaran islam sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia seluruh alam.

Tak luput pula peran para filosofof, baik filsuf Yunani kuno, filsuf Barat hingga para filsuf Islam yang telah memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan pemikiran, sehingga penulis dapat menelaah pengetahuan mereka untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari penulis secara arif dan bijaksana.

Dibalik perjalanan penyusunan skripsi ini, terdapat peran besar dan partisipasi dari banyak pihak yang membantu dan menunjang penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segenap hati penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak **Abdul Salam**, dan Ibu **Rahmi. N**, yang telah membesarkan dan mendidik penulis. Memberi dukungan moril dan materil, serta panjatan doa-doa terbaik. Serta saudara dan keluarga besar penulis yang berada di Makassar untuk turut serta membantu dan mengingatkan agar selalu senantiasa mengerjakan skripsi ini.

2. Rektor Universitas Hasanuddin, ayahanda **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**
3. Dekan Fakultas Ilmu Budaya **Prof. Akin Duli, M.A.** dan para staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Budaya yang turut serta membantu kepengurusan administrasi penulis.
4. Kedua pembimbing penulis, Ibu **Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum,** dan **A. Lili Evita, S.S., M.Hum** yang senantiasa membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu, memotivasi, dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ketua Departemen Ilmu Sejarah Bapak **Dr. Ilham, S.S., M.Hum,** serta dosen-dosen Ilmu Sejarah, **Dr. Muh. Bahar Akkase Teng, Lcp.,M.Hum,** selaku Penasehat Akademik penulis. **Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum, Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S, Dr. Nahdia Nur, M.Hum, Amrullah Amir, S.S.,M.A.,Ph.D, Nasihin, S.S., M.A, Drs Abd. Rasyid Rahman, M.Ag, Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A, Dr. Bambang Sulisty.,M.Hum, Alm. Prof. Dr. Rasyid Asba, M.A,** dan mendiang ibu **Margriet Moka Lappia, S.S., M.S.** Terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama kuliah.
6. Tak luput pula penulis haturkan terima kasih kepada Bapak **Ujddi Usman Pati, S.Sos,** selaku staff administrasi departemen yang banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas selama masa perkuliahan.
7. Kawan-kawan **Ilmu Sejarah 2018** atau **Soe Hok Gie '18, Gafur, Jeje, Yudi, Fajrul, Nain, Anra, Dinal, Syarif, Adi, Darwan, Reza, Jaya,**

Titan, Arfani, Hasbi, Alm. Asar, Fitrah, Risma, Alda, Ulfah, Irma, Fika, Widya, Salsa, Najmah, Fira, Dani, Ain, Yuni, Ana serta **Alm. Fitri**. Terima kasih atas kisah dan kebersamaannya selama masa perkuliahan, yang diawali dengan perkenalan singkat di ruangan 324 dan selama kurang lebih empat tahun yang tidak singkat dengan berbagai suka dan duka dilewati bersama.

8. Kameradku yang selalu bersama hingga membentuk kawan-an tiga serangkai, **Jeje** dan **Gafur**. Terima kasih berkat kalian pola pikir penulis dapat terbentuk selama awal masa kuliah hingga sekarang, sebab iklim literasi yang kalian ciptakan berdampak pada penulis hingga sekarang. Terima kasih atas perjalanannya selalu bersama yang kurang lebih selama lima tahun keadaan suka dan duka dilewati bersama dengan berbagai dinamika yang datang silih berganti.
9. Sahabat-sahabatku yang turut membantu penulis dalam melewati masa-masa krisis penulis, yakni **Arfani, Ilham,** dan **Ikko**, terima kasih berkat kalian skripsi ini akhirnya selesai juga dan turut serta membantu penulis dalam melakukan penelitian di Maros.
10. Kepada keluarga Besar hijau hitam **Kakanda-kakanda dan Adinda-adinda di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ilmu Budaya Cabang Makassar Timur** terima kasih atas proses yang telah diberikan kepada penulis, berkat organisasi ini ruang-ruang intelektual akan terus hidup. “Jaga Api Tetap Nyala”.

11. Kepada **Jaringan Aktifis Filsafat Islam (JAKFI)** yang juga menjadi pionir untuk terus melanjutkan tradisi filsafat islam. Terima kasih atas sumbangsih ilmu yang diberikan kepada penulis melalui ruang-ruang diskusi.
12. Kepada keluarga besar **Humanis KMFIB-UH** yang telah menjadi rumah dan tempat belajar selama masa perkuliahan.
13. Kepada para narasumber penulis Bapak **Abdullah** dan narasumber lainnya. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini
14. Kawan-kawan **KKN 108 Unhas Luwu Timur** yang menjadi sobat lintas fakultas dalam proses pengabdian masyarakat. Terima kasih 55 harinya di Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, banyak cerita dan kisah yang enggan dilupakan, karena sejatinya masa lalu akan tetap jadi pemenangnya.
15. Terima kasihku juga tuk **Bang Along Tikepi (TKP)**, atas dukungan materil yang telah diberikan dalam masa-masa akhir kuliah penulis.
16. Tuk Seseorang yang pernah bersama kurang lebih tiga bulan lamanya yang turut membantu penulis dalam melakukan penelitian di Maros, terima kasih untukmu.
17. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu dan telah memberikan kontribusi yang berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
18. Dan tentunya kepada diri sendiri yang sering lupa kuperhatikan. Maaf dan terima kasih sudah mau tetap maju meski tertatih. Semoga lelah dan jerih payah ini akan terbayar nantinya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi, penulis berharap karya ini dapat berguna bagi bangsa dan negara tentunya dapat menjadi salah satu referensi terkait bagaimana metode pengembangan dan pengelolaan irigasi di Maros pada periode tahun 1975-1995.
Wassalam.

Makassar, 1 November 2023

Usman Salam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iv
HALAMAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR ISTILAH	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Batasan Masalah	9
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5. Manfaat Penelitian	10
1.6. Tinjauan Pustaka.....	11
1.6.1. Penelitian Relevan	11
1.6.2. Landasan Konseptual.....	14

1.7. Metode Penelitian	16
1.8. Sistematika Penulisan	18
BAB II MASYARAKAT DAN IRIGASI DI MAROS	20
2.1. Kondisi Geografis dan Demografis	20
2.2. Kondisi Sosial	28
2.3. Kondisi Ekonomi	32
BAB III PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN	
JARINGAN IRIGASI.....	40
3.1. Pengembangan Daerah Irigasi (D.I.) Bantimurung Kabupaten Maros Tahun 1975 - 1995	40
3.2. Pengelolaan Daerah Irigasi (D.I.) Bantimurung Kabupaten Maros Tahun 1979-1990	52
3.3. Peran Petani Dalam Hal Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Bantimurung Tahun 1975 - 1995	62
3.3.1. Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air	67
3.3.2. Pelaksanaan Iuran Jasa Pelayanan Irigasi (IPAIR).....	76
BAB IV DAMPAK SOSIAL EKONOMI PADA MASA PENGEMBANGAN	
DAN PENGELOLAAN IRIGASI	80
4.1. Dampak Sosial Ekonomi	80
BAB V PENUTUP.....	88
5.1. Kesimpulan	88
DAFTAR PUSTAKA.....	91
DAFTAR INDEKS	97

LAMPIRAN-LAMPIRAN	99
1. Lampiran Arsip Persuratan	99
2. Lampiran Arsip Foto.....	109
3. Daftar Narasumber.....	111
4. Lampiran Foto Irigasi	113
5. Lampiran Foto Narasumber	121
6. Lampiran Berkas.....	124
BIODATA PENULIS	133

DAFTAR ISTILAH

Bendung	: Pengempang untuk menahan air di sungai; tanggul.
<i>Full Cost Recovery</i>	: Pemulihan biaya secara penuh.
Gadu	: Musim tanam atau musim panen yang dilaksanakan saat musim kemarau.
Irigasi	: Pengaturan pembagian air atau pengaliran air menurut sistem tertentu untuk sawah dan sebagainya.
Oncoran	: Pengaliran air ke sawah-sawah melalui irigasi.
Palawija	: Tanaman selain padi, biasa ditanam di sawah atau di ladang.
Pengelolaan	: Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
Pengembangan	: Proses atau cara serta perbuatan yang sifatnya mengembangkan untuk sebuah perluasan kawasan.
Rehabilitasi	: Perbaikan kembali ke keadaan semula.
Rendengan	: Musim tanam atau musim panen yang dilaksanakan saat musim penghujan.
<i>Special Maintenance</i>	: Pemeliharaan Khusus yang ditujukan pada sebuah proyek pengembangan dan pengelolaan irigasi.
Subranting	: Adalah daerah kedua dalam sebuah jaringan irigasi atau yang lazim disebut juga sebagai saluran sekunder.

- Ulu-Ulu : Pejabat pamong desa yang pekerjaannya khusus mengurus pengairan ke sawah dan sebagainya atau orang yang mengatur air.
- Waled : Lumpur yang terdapat pada saluran irigasi.

DAFTAR SINGKATAN

DAS	: Daerah Aliran Sungai
D.I.	: Daerah Irigasi
GP3A	: Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air
IP	: Indeks Pertanaman
IPAIR	: Iuran Jasa Pelayanan Irigasi
IP3A	: Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air
MT	: Musim Tanam
O & P	: Operasi dan Pemeliharaan
PPA	: Petugas Pengatur Air
PPD	: Panitia Pengairan Desa
P3A	: Perkumpulan Petani Pemakai Air
P.U.	: Pekerjaan Umum
REPELITA	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
RK	: Rencana Kegiatan
SIDI	: Sistem Informasi Daerah Irigasi
SLPHT	: Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu
S.I.	: Saluran Induk
S.S.	: Saluran Sekunder

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Objek Penelitian	22
Gambar 3.1. Peta Pembagian Subranting D.I. Bantimurung	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Tahun 1971, 1980, dan 1990.	26
Tabel 2.2.	Jumlah integrasi penduduk antara daerah kota dan daerah desa....	27
Tabel 2.3.	Luas areal sawah (ha) pada masing-masing kecamatan dalam Kabupaten Dati II Maros.....	35
Tabel 2.4.	Tingkat hasil produktivitas tanaman padi di Maros.....	37
Tabel 3.1.	Daftar Saluran dan Luas Lahan Pengairan.....	44
Tabel 3.2.	Daftar kondisi bangunan dan analisa kerusakan jaringan irigasi....	59

ABSTRAK

Usman Salam, Nomor Induk Mahasiswa F061181301, dengan judul “Irigasi Bantimurung di Kabupaten Maros Tahun 1975-1995” dibimbing oleh Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum dan A. Lili Evita, S.S., M.Hum.

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengapa dilakukan pilot proyek pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Bantimurung Kabupaten Maros, bagaimana proses pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi serta apa dampak sosial-ekonomi yang diberikan terhadap dilaksanakannya pilot proyek tersebut di tahun 1975 hingga 1995. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi dengan data dari berbagai sumber, termasuk arsip pemerintah, laporan proyek, dan wawancara. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa proyek ini dimulai dengan tujuan meningkatkan produksi pertanian dan mengurangi ketergantungan pada sistem sawah tadah curah hujan, karena berjalannya pilot proyek tersebut terdapat banyak tantangan yang sifatnya administratif dan dinamika sosial yang cukup kompleks baik antar pemerintah sebagai *Pemangku Kebijakan* maupun masyarakat sebagai aktor di lapangan. Proses pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dimulai pada saat dibukanya kursus pengairan serta kebutuhan petani akan air terutama pada saat musim kemarau tiba, sampai pada akhirnya di tahun 1995 kegiatan *special maintenance* (pemeliharaan khusus) sebagian bagian dari pilot proyek telah selesai dilaksanakan. Dampak sosial mencakup perubahan pola kepemilikan lahan dan hubungan antar petani melalui kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), sementara dampak ekonomi mencakup fluktuasi hasil produksi pertanian dan diversifikasi usaha. Namun, dampak tersebut tidak merata di antara kelompok masyarakat akibat perbedaan letak geografis dan faktor alam. Manajemen proyek, partisipasi masyarakat, dan penyesuaian kebijakan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan proyek irigasi Bantimurung di masa depan.

Kata Kunci: Irigasi, Maros, Bantimurung, Pengembangan, Pengelolaan.

ABSTRACT

Usman Salam, Student Identification Number F061181301, with the title "Bantimurung Irrigation in Maros Regency 1975-1995" was supervised by Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum, and A. Lili Evita, S.S., M.Hum.

The research in this thesis aims to understand why the pilot project for the development and management of the irrigation network in the Bantimurung Irrigation Area (D.I.) in Maros Regency was initiated. It explores the processes of irrigation network development and management and examines the socio-economic impacts of implementing the pilot project from 1975 to 1995. The historical research method, including heuristic, source criticism, interpretation, and historiography, was employed, utilizing data from various sources such as government archives, project reports, and interviews. The findings reveal that the project began with the goal of enhancing agricultural production and reducing dependence on rainfed paddy fields. Throughout the pilot project, numerous administrative challenges and complex social dynamics emerged, involving both government stakeholders and community actors. The development and management of the irrigation network commenced with the introduction of irrigation courses and farmers' need for water, particularly during the dry season, culminating in the completion of *special maintenance* activities by 1995. Social impacts encompass changes in land ownership patterns and farmer relationships through the Farmers Water User Association (P3A) institution, while economic impacts include fluctuations in agricultural production and business diversification. However, these impacts were uneven among community groups due to geographical variations and natural factors. Project management, community participation, and policy adjustments emerge as key factors for the future success of the Bantimurung irrigation project.

Keywords: Irrigation, Maros, Bantimurung, Development, Management.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem irigasi di Indonesia telah dikembangkan untuk menyediakan air bagi lahan pertanian, meskipun tidak semua lahan pertanian saat ini mendapatkan manfaat dari sistem irigasi. Pengembangan lahan pertanian itu sendiri terjadi secara bertahap, seiring dengan kemampuan masyarakat setempat dalam merespons umpan balik yang berasal dari kondisi lingkungan produksi. Pertumbuhan produksi padi pada areal irigasi dapat disebabkan oleh perluasan fisik areal irigasi dan dapat pula melalui perbaikan sistem irigasi itu sendiri yang pada gilirannya memengaruhi areal panen.¹

Pola pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi di beberapa wilayah masih ada yang memakai sistem tradisional (irigasi tadah hujan) dan sebagian lainnya beralih pada sistem pengairan modern yakni (pemanfaatan irigasi yang dikembangkan dan dikelola oleh dinas pekerjaan umum). Setidaknya pada permulaan tahun 1970-an usaha pemerintah dalam melakukan proses intensifikasi pertanian dilakukan secara bertahap dengan memberi bantuan modal untuk kegiatan pengembangan dan pengelolaan yang berupa perluasan jaringan irigasi, rehabilitasi bangunan fisik, optimalisasi kelembagaan petani pemakai air serta operasi dan pemeliharannya.

¹ Effendi Pasandaran (ed), *Irigasi di Indonesia: Strategi dan Pengembangan*, Jakarta: LP3ES, 1991. Hlm 30.

Khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah yang potensial untuk meningkatkan produksi pangan. Guna meningkatkan potensi pangan daerah tersebut, maka faktor infrastruktur sangatlah berperan penting. Salah satu faktor untuk mendukung produksi pangan, yakni dibangunnya jaringan atau daerah irigasi. Kabupaten Maros sendiri memiliki luas Daerah Irigasi yang telah dibangun mencapai 20.222 hektar, yang tersebar di lima puluh lima daerah irigasi yang berada di Kabupaten Maros.²

Irigasi Bantimurung adalah Daerah Irigasi (D.I.) terluas di Kabupaten Maros dengan luas daerah irigasi sebesar 6.513 hektar yang mempunyai saluran Induk di Bendung Batubassi³ dan merupakan salah satu wilayah Daerah Aliran Sungai Maros yang meliputi kecamatan Bantimurung, Cenrana, Tompobulu, dan Simbang. Daerah Irigasi (D.I) Bantimurung mengairi lahan-lahan persawahan di wilayah kecamatan Maros Baru, Lau, Bontoa, Simbang, Bantimurung, dan Turikale.⁴

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, 1990. *Inventaris Arsip Maros dalam Angka 1990*, Indonesia: s.n.

³ Bendung Batubassi berada pada titik koordinat 5° 1' 10.51'' LS dan 119° 39' 45.42'' BT, terletak di Desa Jenne Taesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Prov. Sulawesi Selatan. Dibangun pada tahun 1903, lokasinya sekitar 37,5 Km dari Kota Makassar.

⁴ Siti Mashita Fachrie et.al.,2019. Penilaian Kinerja Sistem Irigasi Utama Daerah Irigasi Bantimurung Kabupaten Maros, *Jurnal Agritechno*, Vol 12 No.1. hlm 69.

Pembangunan Bendung Batubassi dan Daerah Irigasi (D.I.) Bantimurung di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, merupakan bagian dari program kebijakan politik etis yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek pertanian dan pengaturan air untuk irigasi. Bendung Batubassi dibangun pada tahun 1903 dan mulai beroperasi pada tahun 1910, sementara pembangunan D.I. Bantimurung berlangsung dari tahun 1910 hingga 1936.⁵ Proyek-proyek ini melibatkan partisipasi masyarakat lokal, pendatang, dan bahkan wajib militer sebagai pekerja dalam pembangunannya. Pembangunan infrastruktur irigasi ini berhasil menciptakan lebih dari 8.400 *bouw*⁶ saluran irigasi yang bertujuan untuk mendukung pertanian dan distribusi air di daerah tersebut.⁷

Pada periode tahun 1970-1974, pemerintah Indonesia memperkenalkan suatu program pembangunan pertanian yang dikenal dengan nama Revolusi Hijau dan di kalangan petani sering disebut sebagai program Bimas (Bimbingan Massal). Revolusi Hijau merupakan konsep yang diadopsi

⁵ De_Indische_courant terbitan tanggal 19 Juli 1902, <https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=irrigatie+maros&coll=ddd&identifier=ddd:110557503:mpeg21:a0116&resultsidentifier=ddd:110557503:mpeg21:a0116&rowid=3>

⁶ *Bouw* dari Bahasa Belanda atau bahasanya Bahu/Bau yang berarti “garapan”. Jika 1 *bouw*-nya adalah 7095,5 meter persegi, maka luas total lahan garapan daerah irigasi Bantimurung adalah 59.610.600 meter persegi atau 5.961,06 hektar.

⁷ Inventaris National Archives. NL-HaNA_2.10.39_286_0278-groot diakses pada tanggal 25 Mei 2023 Pukul 13.00 Wita. Hlm 307.

dari gerakan Bimas di Indonesia, dan bertujuan sebagai program nasional untuk meningkatkan produksi pangan, terutama dalam mencapai swasembada beras.⁸

Revolusi Hijau juga telah berhasil menyebarkan teknologi yang sesuai dan meningkatkan produktivitas padi dengan cepat di sistem pertanian dataran rendah yang menggunakan irigasi. Pemerintah telah membangun berbagai prasarana untuk mendukung program swasembada pangan di kawasan tersebut. Namun, hal ini telah menyebabkan kesenjangan antara daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Sayangnya, kawasan dataran tinggi tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah, sehingga keberlanjutan infrastruktur yang mendukung Revolusi Hijau menjadi terancam.⁹

Secara geografis, letak Daerah Irigasi (D.I.) Bantimurung berada pada dataran rendah. Hal tersebut menyebabkan pembangunan perluasan jaringan irigasi baru serta proses rehabilitasi kurang mengalami hambatan. Namun, perbedaannya hanya terletak pada wilayah dataran rendah bagian hulu dan dataran rendah bagian hilir. D.I. Bantimurung yang terletak di dataran rendah bagian hilir seperti di Kecamatan Maros Baru dan Kecamatan Maros Utara

⁸ Loekman Soetrisno, *Pertanian Pada abad ke 21*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, hlm 13.

⁹ Ruf Francois and Frederic lancon,” *From Slash and Burn to Replanting: Green Revolution in the Indonesia Uplands*”, a.b. Yoddang, *Dari Sistem Tebang Bakar ke Peremajaan Kembali: Revolusi Hijau di Dataran Tinggi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2005, hlm. 4.

sering mengalami banjir setiap tahunnya,¹⁰ sehingga proses perluasan jaringan irigasi sering mengalami hambatan pada wilayah hilir ini. Kondisinya masih bersifat saluran tanah dan ketersediaan air untuk mengairi areal persawahan tidak cukup. Pada musim tanam gadu (musim tanam kedua) para petani bergotong royong melakukan pengerukan tanah dengan cara menggunakan sistem pengairan tradisional yang peralatannya masih sederhana. Pada masa itu para petani membuat saluran air menggunakan cangkul, membajak sawah dengan kerbau, serta mengatasi permasalahan air dengan membuat parit-parit kecil.¹¹

Kemudian pada tahun 1975-1977 adalah proses pengembangan dan rehabilitasi secara lebih berkelanjutan dan massif yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Dalam proses tersebut dilaksanakan monitoring proyek-proyek irigasi¹² guna untuk memproses secara rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektifikasi program yang sedang berjalan.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Maros, *Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 1980*.

¹¹ Pengerjaan saluran irigasi yang masih bersifat sederhana tersebut dikhususkan pada saluran tersier yang langsung mengaliri lahan sawah petani. *Wawancara*, Abdullah (56 Tahun). Wawancara dilakukan di kantor pengamat Daerah Irigasi (D.I) Bantimurung, Kec. Maros Baru pada 9 Januari 2023.

¹² Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, *Inventaris Arsip Maros Vol. II No. Reg 1637*. Nomor 871/F.5/8/77, tentang Pelaksanaan Proyek Monitoring Irigasi, tanggal 20 Agustus 1977.

Luas lahan sawah yang dialiri oleh Daerah Irigasi (D.I) Bantimurung sebesar 6.513 ha, membawa pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan jumlah penghamburan bibit benih musim tanam. Pada musim tanam 1979/1980 sesuai instruksi bupati kepala daerah tingkat II Maros agar pembukaan pintu pengairan irigasi Bantimurung segera dilaksanakan untuk *mensupplay* kebutuhan air pada sawah-sawah yang ada di Kec. Bantimurung dan Kec. Maros Baru.¹³

Kebutuhan air untuk musim tanam tidak hanya terjadi pada tahun 1979/1980, akan tetapi berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Tepatnya pada tahun 1987 salah satu contoh yakni kebutuhan air irigasi untuk dua Rencana Kegiatan (RK) Ketubung dan Malewang untuk menghadapi musim tanam gadu menjadi terhambat. Ini dikarenakan saluran terkecil Daerah Irigasi (D.I) Bantimurung, yakni saluran tersiernya mengalami kebuntuan dari saluran sekundernya di Bonti-Bonti, Kec. Bantimurung.¹⁴

Untuk mendukung proses percepatan peningkatan hasil produktivitas pertanian, maka pemerintah, mengambil suatu kebijakan dengan mengontrol langsung operasi dan pengelolaan jaringan irigasi, dibentuklah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

¹³ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, *Inventaris Arsip Maros Vol. II No. Reg 1636*. Nomor Put 4/K/186/79, tentang Pembukaan Pintu Air Pengairan Bantimurung, tanggal 26 November 1979.

¹⁴ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan *Inventaris Arsip Maros Vol. II No. Reg 1655*. Nomor UM.01 01/52/V-87, tentang Rencana perbaikan saluran petak tersier BBB3 D.I. Bantimurung., tanggal 14 Mei 1987.

Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi pasal 20 (dua puluh).¹⁵ Kelembagaan P3A ini memiliki sepak terjang dalam hal pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi dalam pendistribusian air secara merata ke lahan-lahan pertanian masyarakat sekitar.

Pada aspek dinamika sosial yang terjadi selama kurun waktu pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yakni tahun 1975-1980an, dikarenakan kurangnya intensitas pendistribusian air secara lebih merata terutama pada masa pembangunan banyak masyarakat yang mengeluh pada saat musim kemarau. Akhirnya di tahun 1982, setelah pemerintah mengeluarkan aturan mengenai pembentukan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), maka sejak saat itu masyarakat melakukan pendistribusian air secara lebih terorganisir.¹⁶

Untuk mengatasi hal-hal yang demikian, maka pada rentan tahun 1990-1995an, pemerintah melakukan penyuluhan pertanian, dan sosialisasi mengenai metode pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi secara lebih berkelanjutan guna untuk mengaliri langsung ke area persawahan masyarakat, serta pembagian air secara bertahap (terstruktur). Dengan adanya penyuluhan, pengembangan, dan pengelolaan jaringan irigasi membuat

¹⁵ John S. Ambler, “Perkumpulan Petani Pemakai Air di Indonesia Tradisi dan Masa Depan”, dalam Efendi Pasandaran (ed), *Irigasi di Indonesia: Strategi dan Pengembangan*, Jakarta: LP3ES, 1991. hlm 303.

¹⁶ *Wawancara*, Abdullah, (56 Tahun). Wawancara dilakukan di kantor pengamat Daerah Irigasi (D.I) Bantimurung, Kec. Maros Baru pada 9 Januari 2023.

produksi hasil pertanian bertambah maju dan pada akhirnya pendapatan masyarakat pedesaan semakin meningkat.¹⁷

Adapun solusi yang ditawarkan yakni diperlukannya peran sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Pada tataran pemerintahan, peranan yang kiranya perlu dikembangkan secara lebih massif adalah penyuluhan pertanian dan pembangunan sarana irigasi secara intensif dan berkelanjutan. Namun, pada masyarakat, titik fokus perhatian utamanya adalah pada operasional dan pengembangannya pada tingkat skala yang lebih kecil terutama di pintu-pintu pengairan masing-masing P3A D.I. Bantimurung.¹⁸

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah tentang **“Irigasi Bantimurung Kabupaten Maros Tahun 1975 - 1995”**. Adapun pertanyaan penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa pemerintah Kabupaten Maros melakukan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi D.I. Bantimurung Kabupaten Maros tahun 1975 - 1995?
2. Bagaimana proses pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi di Daerah Irigasi (D.I) Bantimurung Kabupaten Maros tahun 1975 – 1995?

¹⁷ *Wawancara*, Abdullah, (56 Tahun). Wawancara dilakukan di kantor pengamat Daerah Irigasi (D.I) Bantimurung, Kec. Maros Baru pada 9 Januari 2023.

¹⁸ John S. Ambler, “Perkumpulan Petani Pemakai Air di Indonesia Tradisi dan Masa Depan”, dalam Efendi Pasandaran (ed), *Irigasi di Indonesia: Strategi dan Pengembangan*, Jakarta: LP3ES, 1991. hlm 297.

3. Apa dampak sosial ekonomi yang diberikan terhadap pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Bantimurung tahun 1975 – 1995?

1.3. Batasan Masalah

Fokus batasan masalah penelitian ini mengacu pada batasan spasial dan batasan temporal. Batasan spasial yang dimaksud disini adalah batasan pada satu wilayah tertentu, sehingga wilayah tersebut menjadi objek penelitian yang kiranya bisa lebih spesifik untuk dapat dikaji. Untuk batasan spasial ini, penulis membatasi pada enam wilayah kecamatan di Kabupaten Maros yakni Kecamatan Bantimurung, Lau, Maros Baru, Turikale, Simbang, dan Bontoa, karena enam kecamatan tersebut terdapat area persawahan yang dialiri oleh Daerah Irigasi (D.I) Bantimurung.

Adapun untuk batasan temporalnya dimulai pada tahun 1975, karena pada tahun tersebut pengembangan dan pengelolaan jaringan atau daerah irigasi Bantimurung mulai dilakukan secara lebih intensif dengan mengacu pada program pemerintah Orde Baru saat itu. Serta adanya dinamika sosial ekonomi dan budaya yang mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam hal bertani. Periode akhir dari penelitian ini yakni sampai pada tahun 1995, karena pemeliharaan khusus (*Special Maintenance*) jaringan fisik irigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah telah selesai.¹⁹

¹⁹ Pemeliharaan Khusus (*Special Maintenance*) adalah proses rehabilitasi besar-besaran terhadap jaringan fisik irigasi yang mengalami kerusakan.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan pemerintah Kabupaten Maros melakukan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi D.I. Bantimurung Kabupaten Maros dalam rentan waktu tahun 1975 – 1995.
2. Untuk mengetahui proses pengembangan dan pengelolaan irigasi di Daerah Irigasi (D.I) Bantimurung tahun 1975 - 1995.
3. Untuk mengetahui pengaruh dibangunnya Irigasi terhadap perkembangan sektor sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar Daerah Irigasi (D.I) Bantimurung, Kabupaten Maros tahun 1975 – 1995.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari skripsi ini adalah untuk:

1. Akademik
 - a.) Untuk mengetahui pembabakan sejarah mengenai aktivitas dilakukannya proses pengembangan dan pengelolaan Daerah Irigasi (D.I) Bantimurung Kabupaten Maros pada periode tahun 1975 – 1995.
 - b.) Sebagai referensi di bidang pertanian dengan wacana sejarah.

2. Praktis

- a.) Sebagai bahan pengetahuan masyarakat saat ini untuk mengetahui metode sistem pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi saat itu.
- b.) Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi di Maros melalui perspektif sejarahnya.

1.6. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilaksanakan untuk meninjau kembali pustaka, penelitian yang relevan dan literatur maupun bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian penulis. Tinjauan pustaka juga mengemukakan sejumlah teori maupun konsep dari para pendapat ahli terhadap fokus penelitian yang akan dilakukan.

1.6.1. Penelitian Relevan

Penelitian mengenai irigasi telah dilakukan oleh beberapa ahli. Adapun hasil-hasil penelitian baik penelitian terdahulu maupun penelitian yang relevan, ditelisik oleh penulis sebagai suatu perbandingan yang tidak terlepas dari topik penelitian penulis yakni Daerah Irigasi (D.I) Bantimurung, ditinjau dari aspek sejarahnya. Beberapa literatur seperti buku dan skripsi yang berhubungan dengan topik penelitian penulis akan diulas secara singkat.

Efendi Pasandaran (ed), *Irigasi di Indonesia: Strategi dan Pengembangan*. Buku ini mendeskripsikan bagaimana pengelolaan sumber daya air secara efektif dan efisien dan buku ini juga merupakan hasil

kumpulan tulisan para peneliti di bidang irigasi, pertanian, dan pedesaan. Buku tersebut mengkaji secara singkat perkembangan pertanian yang ada di Indonesia pada masa orde baru dengan kebijakan Repelita-Nya yang mengalami peningkatan cukup signifikan karena berbagai usaha dan strategi berhasil diterapkan pada masa Repelita tersebut yakni program intensifikasi pertanian disertai dengan paket teknologinya, investasi irigasi, penelitian dan penyuluhan, serta kebijaksanaan harga baik untuk masukan maupun pengeluaran yang memadai. Lebih spesifik dalam hal irigasi, program Repelita juga berfokus pada rehabilitasi-rehabilitasi berbagai jaringan irigasi dengan kerangka pengelolaan terpadu serta perluasan areal persawahan, hal ini sebagai bentuk tercapainya tujuan swasembada beras yang berkemajuan.²⁰

John S. Ambler (ed), *Irigasi di Indonesia: Dinamika Kelembagaan Petani*. Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana perubahan dalam kelembagaan petani dijelaskan. Buku tersebut juga menggambarkan perkembangan pertanian di berbagai wilayah di Indonesia, baik dari perspektif sejarah, saat ini, dan masa depan. Buku ini juga merupakan hasil kolaborasi beberapa peneliti dalam bidang mereka masing-masing, yang berbagi pemikiran mereka tentang pendekatan dan langkah-langkah untuk memperkuat pola kelembagaan dan manajemen irigasi. Selain itu, buku ini juga memeriksa kerangka kebijakan dan aspek hukum atau regulasi yang dapat memberikan legitimasi dan meningkatkan fungsi serta peran lembaga

²⁰ Effendi Pasandaran (ed), *Irigasi di Indonesia: Strategi dan Pengembangan*, Jakarta: LP3ES, 1991.

petani. Dengan demikian, buku ini bertujuan untuk menginspirasi dan menjadi wadah bagi inovasi dalam pola kelembagaan dan manajemen irigasi, yang lebih dapat diandalkan, sambil menghormati tradisi dan pengetahuan petani yang ada.²¹

Suzanna E. Siskel dan S.R. Hutapea (ed), *Irigasi di Indonesia: Peran Masyarakat dan Penelitian*. Berisi penjelasan mengenai peran sentral masyarakat sebagai motor penggerak utama dalam praktik pengelolaan irigasi, serta peran yang dimainkan oleh peneliti dalam aspek teoretis. Buku ini mencerminkan bahwa aktivitas irigasi melibatkan minimal dua lingkungan kunci. Pertama, petani, yang memiliki budaya, struktur organisasi, dan teknologi yang unik. Kedua, birokrasi yang memiliki tanggung jawab dalam pengaturan, pelaksanaan operasional, dan pengelolaan irigasi sesuai dengan prosedur dan teknologi yang berlaku di lembaga tersebut serta penerapannya secara nasional.²²

Asriani dalam skripsinya mengenai "*Irigasi di Bantaeng 1952-1960 (Sebuah Kajian Sejarah Sosial dan Ekonomi)*" menjelaskan tentang eksistensi bangunan irigasi di Kabupaten Bantaeng secara umum serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, sebelum dan sesudah dibangunnya

²¹ John S. Ambler (ed), *Irigasi di Indonesia: Dinamika Kelembagaan Petani*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1992.

²² Suzanne E. Siskel dan S.R. Hutapea (ed), *Irigasi di Indonesia: Peran Masyarakat dan Penelitian*, Jakarta: LP3ES 1996.

Irigasi di Bantaeng.²³ Pada skripsi ini, kecenderungan mengenai data-data ekonomi lebih banyak disampaikan daripada aspek sosial. Kemudian, yang membedakan dengan Penulis yakni kecenderungan aspek sosialnya lebih mendalam daripada aspek ekonominya. Melihat skripsi tersebut setidaknya bisa menjadi bahan acuan untuk melihat kerangka konsep pendapatan ekonominya.

1.6.2. Landasan Konseptual

Menurut Vaughn E. Hansen, irigasi adalah sebuah sistem bangunan pengairan untuk melakukan pendistribusian air secara terstruktur dan melakukan penyediaan air pada tanah untuk kebutuhan tanam-menanam. Adapun secara fungsi, irigasi berguna untuk memberikan stok air di masa musim kemarau pendek guna untuk menyediakan jaminan panen, mendinginkan tanah dan atmosfer agar pertumbuhan tanaman tetap stabil, untuk mengurangi bahaya pembekuan, untuk mengurangi bahaya erosi tanah serta memudahkan para petani membajak sawah sebab tanah yang digarapnya bisa melunak.²⁴

Adapun sistem irigasi menurut PP No. 20 Tahun 2006 merupakan satu kesatuan unit yang didalamnya terdiri dari prasarana irigasi²⁵, air irigasi,

²³ Asriani, *Irigasi di Bantaeng 1952-1960; Suatu Kajian Sejarah Sosial Ekonomi*. (Makassar: Unhas Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah, 2016).

²⁴ Vaughn E. Hansen, dkk, *Dasar-Dasar dan Teknik Irigasi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992). hlm 4.

²⁵ Terdiri dari bangunan dan kawasan/daerah irigasi itu sendiri.

manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi²⁶, dan sumber daya manusia. Jadi, sistem irigasi dapat diartikan sebagai unitas yang tersusun dari berbagai komponen, menyangkut upaya penyediaan, pembagian, pengelolaan, dan pengaturan air dalam rangka meningkatkan produksi pertanian.²⁷

Irigasi juga menyangkut aspek kehidupan sosial ekonomi dan budaya petani. Maka dari itu, pemakaian predikasi tinjauan sosial ekonomi dan budaya dalam perspektif sejarah, membantu penulis untuk menganalisis serta menginterpretasikan masyarakat sebagai poros utama bahan kajian yang mampu memberikan model inspirasi heuristik dan berguna dalam pencarian, pengumpulan, serta penyusunan sumber-sumber yang telah didapat di ranah sosial.²⁸ Berdasarkan tinjauan dari sejarah ekonomi, tidak hanya berbicara tentang harga jual beli nilai suatu barang, akan tetapi sejarah ekonomi juga menjurus kepada masalah tahapan perkembangan masyarakat baik secara makro (skala besar) dan juga secara mikro. Dalam penulisan sejarah menggunakan pendekatan ilmu ekonomi tidak hanya menggunakan ukuran-ukuran ekonomi matematis yang kiranya hanya berlaku di tataran industrial. Adapun yang dimaksud, yakni penulisan sejarah ekonomi yang berbasis di

²⁶ Kelembagaan pengelolaan irigasi yang dimaksud adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air atau yang biasa disingkat P3A.

²⁷ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/20tahun2006pp.htm> diakses pada tanggal 20 Januari 2023, Pukul 00.20 Wita.

²⁸ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm 42.

pedesaan dengan masyarakat tradisional sebagai pemeran utama dalam menjalankan sistem ekonomi mereka.²⁹

1.7. Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang telah ditulis diatas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis irigasi yang dibangun oleh pemerintah orde baru dan apa pengaruh sosial ekonominya bagi masyarakat di sekitar Daerah Irigasi Bantimurung, Kabuapten Maros selama dan sesudah di bangunnya irigasi. Penulis akan berupaya untuk merekonstruksi peristiwa tersebut untuk menjadi tulisan sejarah yang disusun secara sistematis dan kronologis. Untuk mencapai hal tersebut, penelitian ini disusun dengan memakai metode penelitian sejarah. Penelitian ini dilakukan secara bertahap, yakni: Pengumpulan Sumber (Heuristik), Kritik Sumber (Verifikasi), Interpretasi, dan Penulisan Sejarah (Historiografi).

1.) Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Tahap ini merupakan tahap kedua dalam metode penelitian sejarah. Pada tahap ini penulis mengumpulkan sumber-sumber sejarah maupun sumber-sumber kontemporer yang ada relevansinya dengan keirigasian. Sumber pun terbagi menjadi dua, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber sezaman atau sumber yang paling mendekati dengan peristiwa tersebut. Namun, sumber sekunder atau bisa juga disebut dengan sumber kedua yang banyak ditulis oleh peneliti-peneliti terdahulu yang

²⁹ *Ibid.*, hlm 99

hampir memiliki kemiripan dengan sumber awalnya (primer). Adapun secara struktural pengumpulan sumber-sumber informasi adalah sebagai berikut:

- a.) Teknik wawancara, cara ini merupakan teknik pengumpulan data yang secara langsung terjun ke Daerah Irigasi (D.I) Bantimurung untuk memperoleh data dari petani itu sendiri, dengan terlebih dahulu menerapkan kriteria informan dan model wawancara yang di pakai.
- b.) Teknik observasi, cara ini merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan terhadap objek secara langsung.
- c.) Studi kepustakaan, cara ini yaitu dengan mengumpulkan buku, dokumen, arsip dan lain sebagainya yang terkait dengan judul penelitian. Sumber-sumber tertulis tersebut dapat diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Pusat Unhas, Badan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pustaka-Pustaka lainnya yang berada di lingkup kawasan penelitian penulis.

2.) Kritik Sumber

Setelah melakukan pengumpulan beberapa sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan selanjutnya adalah proses kritik (verifikasi), baik itu kritik ekstern maupun kritik intern. Kritik ekstern disini adalah proses kritik untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan otentisitas sumber sejarah tersebut. Indikator kritik ekstern yakni pengecekan tanggal penerbitan dokumen, pengecekan bahan berupa kertas dan tinta apakah cocok dengan masa dimana bahan semacam itu biasa digunakan atau di produksi. Memastikan apakah dokumen tersebut asli atau salinan.

Setelah memverifikasi bagian luarnya, kemudian kritik intern bermain. Disini bisa dilihat apakah isi dari dokumen tersebut bisa dinilai kredibilitasnya atau tidak. Proses pengujian ini dilihat berdasarkan hasil bacaan suatu sumber kemudian peneliti bisa menganalisis apakah sumber ini yang paling kuat dengan realitas masa lampau serta konsistensi sumber terhadap isi atau kontennya.

3.) Interpretasi

Sumber-sumber yang telah dikumpulkan dan kemudian diuji kredibilitasnya, langkah selanjutnya adalah tahap interpretasi atau penafsiran. Penafsiran disini dilakukan oleh peneliti berdasarkan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti sendiri baik dengan memparafrase ataupun dengan metode deskriptif analisis dan sintesa.

4.) Penulisan Sejarah (Historiografi)

Penulisan merupakan tahap terakhir dalam metode penelitian ini. Peneliti akan menguraikan fakta-fakta sejarah yang telah terstruktur secara sistematis dan kronologis. Penulisan ini ditulis berdasarkan pada data-data yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁰

1.8. Sistematika Penulisan

Peneliti akan lebih mudah mengulas dan menguraikan karya tulis ini secara sistematis dan runut, serta menjadi satu kesatuan yang utuh, maka penulisan ini akan dibagi menjadi lima bab, yakni:

³⁰ M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, Cetakan Ke-2. Depok: Prenadamedia Group. hlm 219-230.

BAB I berisi tentang pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari sub bab latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang Masyarakat dan Irigasi di Maros yang urainnya mengenai kondisi awal geografis D.I. Bantimurung dan kondisi umum sosial dan ekonomi masyarakat petani yakni sebelum dilaksanakannya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi secara intensif.

BAB III menjelaskan tentang pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi serta peran petani dalam kerangka kelembagaan sebagai salah satu aktor pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tahun 1975 – 1995.

BAB IV berisi tentang pengaruh sosial ekonomi pada masa pengembangan dan pengelolaan Daerah Irigasi (D.I.) Bantimurung Kabupaten Maros Tahun 1990-1995.

BAB V adalah penutup, yang didalamnya terdapat saran dan kesimpulan. Pada bab ini penulis akan memberikan jawaban secara komprehensif dan singkat atas berbagai rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

MASYARAKAT DAN IRIGASI DI MAROS

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran secara umum Kabupaten Maros dengan spesifikasi Daerah Irigasi (D.I.) Bantimurung yang letak geografisnya berada pada dataran rendah sehingga memungkinkan masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, serta kondisi demografis (kependudukan) Kabupaten Maros juga akan dibahas berdasarkan jumlah penduduk menurut data statistik. Untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Maros secara umum, juga akan dijelaskan mengenai sistem stratifikasi dan tingkat hasil produksi pertanian sebelum masa periode dilaksanakannya pilot proyek pengembangan dan pengelolaan irigasi.

2.1. Kondisi Geografis dan Demografis

Kabupaten Maros adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Maros yakni 1.081,00 Km², yang memiliki 4 wilayah Kecamatan¹ dan 41 Desa/Kelurahan. Kabupaten Maros juga merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Kota Makassar. Maka daripada itu, Kabupaten Maros menjadi salah satu daerah penyangga ibukota dan memegang peranan penting dalam pembangunan Kota Makassar dulu dan

¹ Kecamatan tersebut yakni Kec. Camba, Mandai, Bantimurung, dan Maros Baru. Adapun fokus objek penelitian ini, yakni Kec. Bantimurung dan Kec. Maros Baru yang merupakan daerah aliran jaringan irigasi D.I. Bantimurung.

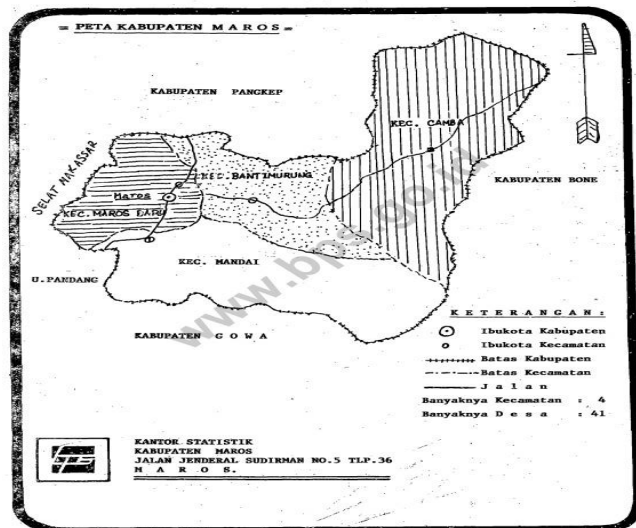
hingga saat ini. Secara administrative, Kabupaten Maros berbatasan dengan wilayah:

- a.) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- b.) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar
- c.) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bone
- d.) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.²

Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah lumbung padi di Sulawesi Selatan. Sebagai daerah penyangga, maka daerah ini memasok beras ke daerah-daerah sekitarnya termasuk Kota Makassar. Berdasarkan konteks tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Maros memiliki luas lahan pertanian yang dialiri irigasi seluas 20.222 ha, yang tersebar di lima puluh lima daerah irigasi yang berada di Kabupaten Maros, dengan luas areal irigasi terluas yakni Daerah Irigasi Bantimurung sebesar 6.513 ha.³

² Badan Pusat Statistik Maros, *Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 1980*, Bab I Letak Geografis. Hlm 1-3.

³ Andi Tenri Were Sida, *Sistem Informasi Spasial Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Bantimurung* (Makassar : Unhas, Skripsi Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, 2012).



Gambar 2.1. Peta Objek Penelitian

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros tahun 1980).

Berdasarkan peta objek penelitian diatas yang merujuk pada peta Kabupaten Maros tahun 1980, menunjukkan bahwa pada tahun tersebut hanya terdiri dari empat kecamatan saja, yakni Kecamatan Camba, Mandai, Bantimurung, dan Maros Baru. Adapun lokasi khusus objek penelitian yakni Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Maros Baru. Selanjutnya pada tahun 1990, Kecamatan Maros Utara terbentuk atas pemekaran dari Kecamatan Maros Baru, maka sampai perodesasi penelitian ini hanya tiga kecamatan atau daerah tingkat tiga yang masuk dalam kategori lokasi penelitian penulis.⁴

⁴ Badan Pusat Statistik Maros, *Op.Cit.* Hlm 3

Daerah Irigasi (D.I) Bantimurung yang memiliki luas wilayah atau luas lahan yang dialiri irigasi seluas 6.513 Ha dan secara koordinat terletak antara 119° 40' 05" – 119° 47' 40" BT dan 04° 59' 20" – 05° 05' 50" LS. Daerah Irigasi Bantimurung mendapatkan suplai air dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Maros yang mengalir empat wilayah/kecamatan, yaitu Bantimurung, Cenrana, Tompobulu, dan Simbang.⁵ Adapun luas keseluruhan DAS Maros ini mencapai 841,07 ha dan merupakan DAS terpanjang di Kabupaten Maros dengan mengairi lahan kritis seluas 0,46% artinya, dapat ditelaah bahwa wilayah hulu DAS Maros sudah dalam keadaan kritis, dikarenakan erosi dan pengikisan bibir sungai yang menyebabkan aliran air sungai terutama pada musim kemarau intensitasnya menurun terutama untuk kebutuhan ketersediaan air irigasi pada musim kemarau pada wilayah-wilayah hilir sungai Maros.⁶

Secara hidrologi letak DAS Maros mengikuti alur dari daerah pegunungan hingga ke hilir dan memiliki beberapa anak sungai di Kecamatan Tompobulu, Tanralili, dan Mandai. Hal inilah yang membuat DAS Maros

⁵ Siti Mashita Fachrie, et.al.,2019. Penilaian Kinerja Sistem Irigasi Utama Daerah Irigasi Bantimurung Kabupaten Maros, *Jurnal Agritechno*, Vol 12 No.1.

⁶ Sumber : Dinas Kehutanan, Dinas PU/PSDA Kab. Maros, Dinas PSDA Prov. Sulsel tahun 2009 (dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten Maros pada link <https://docplayer.info/73374671-Bab-ii-gambaran-umum-kabupaten-maros.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 01.42 wita), hlm 7.

begitu signifikan keberadaannya sebagai sumber mata air utama bagi masyarakat petani di sejumlah daerah irigasi Kabupaten Maros.⁷

Adapun yang menjadi lokus objek lokasi penelitian yakni Kecamatan Bantimurung, Simbang, Turikale, Maros Baru, Lau, dan Bontoa sebagian besar terletak di daerah hilir DAS Maros. Hal ini mengakibatkan daerah tersebut terutama yang berada di daerah pesisir laut yakni Kecamatan Maros Baru, Lau, dan Bontoa mengalami trend peningkatan evolusi laut pasang yang menimbulkan abrasi tanah pantai dan juga berpengaruh pada efektivitas sistem drainase pada daerah irigasi di wilayah datar dekat laut.⁸

Kondisi topografi Kabupaten Maros khususnya di daerah pesisir umumnya relatif memiliki dataran rendah dengan curah hujan bulanan rata-rata dalam setahun 278,5 sehingga wilayah ini paling sesuai untuk budidaya padi.⁹

Jika suatu kondisi geografis memungkinkan adanya permukiman, maka masyarakatlah sebagai subjek yang ada di dalamnya. Keadaan masyarakat secara alamiah apabila ditinjau dari segi kuantitasnya dapat diukur dengan menggunakan neraca pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh selisih antara kelahiran dan kematian dalam jangka waktu tertentu.

⁷ *Ibid.*, hlm 8.

⁸ *Ibid.*, hlm 2.

⁹ *Ibid.*

Proses migrasi (perpindahan) penduduk juga merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi keadaan masyarakat.¹⁰

Kehidupan masyarakat berdasarkan tingkat rasio pendidikan, ekonomi, dan mobilitas sosial adalah faktor-faktor pendukung guna untuk mengetahui indikator kesejahteraan suatu masyarakat berdasarkan data demografis wilayah setempat dalam kurun waktu tertentu.¹¹ Adapun untuk mengetahui kadar kuantitas penduduk suatu wilayah, maka diadakanlah sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan salah satu indikator untuk mengetahui jumlah penduduk, keadaan ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh negara secara komprehensif karena kepentingan demografis negara yang bersangkutan.¹²

Keadaan penduduk masyarakat petani di Daerah Irigasi (D.I) Bantimurung Kabupaten Maros dalam rentan waktu tahun 1971 sampai 1990¹³ terus mengalami kenaikan. Hal ini tidak terlepas dari mobilitas sosial

¹⁰ Suwito, *Pengantar Demografi*, Malang: Ediiide Infografika, 2020. Hlm 96.

¹¹ *Ibid.*, hlm 18. Uraian mengenai kondisi ekonomi (mata pencaharian) dan kehidupan sosial masyarakat petani di D.I. Bantimurung akan dijelaskan pada poin berikutnya yang juga merujuk data kependudukan.

¹² *Ibid.*, hlm 6.

¹³ Pengadaan sensus penduduk di Indonesia diadakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk tahun 1971 adalah sensus penduduk kedua setelah yang pertama tahun 1961 pada era kemerdekaan. Kemudian yang ketiga diadakan tahun 1980 dan yang keempat tahun 1990. (Sumber : *Penduduk Sulawesi Selatan : Hasil Sensus Penduduk 1990 Pencacahan Lengkap*).

masyarakat yang terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk di tiga kecamatan¹⁴ yang sekaligus merupakan aliran Daerah Irigasi (D.I) Bantimurung Kabupaten Maros. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk di tiga kecamatan sekaligus lokasi objek penelitian selama kurun waktu 1971 – 1990:

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Tahun 1971, 1980, dan 1990

No.	Kecamatan	Tahun		
		1971	1980	1990
1.	Bantimurung	29.577 Jiwa	41.099 Jiwa	48.166 Jiwa
2.	Maros Baru	44.386 Jiwa	77.189 Jiwa	95.465 Jiwa
3.	Maros Utara	- Jiwa	- Jiwa	18.770 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, *Penduduk Kabupaten Maros Menurut Kelompok Umur* tahun 1990.

Berdasarkan tabel jumlah penduduk yang tinggal di sekitar Daerah Irigasi (D.I.) Bantimurung Kabupaten Maros rentan tahun 1971 - 1990 terus mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan penduduk disebabkan oleh berbagai faktor terutama angka kelahiran yang meningkat dan adanya proses migrasi.

¹⁴ Pengambilan ketiga kecamatan tersebut karena belum adanya pemekaran kecamatan Bontoa, Lau, Simbang, dan Turikale. Ketiga kecamatan itu merupakan kecamatan awal atau kecamatan induk sebelum dimekarkan pada tahun 1990 – 2000an.

Kemudian dapat dilihat juga kenaikan jumlah penduduk yang terbanyak berada di kecamatan Maros Baru, karena kecamatan tersebut merupakan daerah irigasi sekaligus pusat pemerintahan kabupaten yakni kota Turikale yang dimana masyarakatnya banyak juga yang bermata pencaharian di sektor jasa dan pegawai negeri.

Integrasi wilayah daerah kota dan daerah pedesaan di ketiga kecamatan tersebut dalam ruang lingkup Daerah Irigasi (D.I.) Bantimurung, kiranya perlu diklasifikasikan. Karena hal tersebut merupakan dua hal yang mendasar terhadap mata pencaharian. Berikut ini adalah tabel klasifikasi integrasi antara daerah kota dan daerah desa berdasarkan sensus penduduk Kabupaten Maros tahun 1990:

Tabel 2.2. Jumlah integrasi penduduk antara daerah kota dan daerah desa

No.	Kecamatan	Integrasi	
		Daerah Kota	Daerah Pedesaan
1.	Bantimurung	- Jiwa	48.166 Jiwa
2.	Maros Baru	11.187 Jiwa	84.278 Jiwa
3.	Maros Utara	- Jiwa	15.341 Jiwa

Sumber: Inventaris Arsip Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, *Penduduk Kabupaten Maros Menurut Kelompok Umur* tahun 1990.

Kondisi demografis Daerah Irigasi (D.I.) Bantimurung Kabupaten Maros dapat diklasifikasikan berdasarkan sistem mata pencaharian, pendidikan, kebudayaan dan berbagai unsur lainnya. Namun, rasio jumlah pertumbuhan penduduk dan sistem mata pencaharian merupakan dua hal

yang paling mendasar untuk mengetahui sistem demografis suatu wilayah tertentu.

2.2. Kondisi Sosial

Kondisi sosial adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki kedudukan, stratifikasi, kepemilikan yang dimiliki seorang individu ataupun kelompok dan sistem kekerabatan akan sangat mempengaruhi status sosial seseorang atau kelompok maupun keluarganya di suatu lingkungan masyarakat.

Kondisi sosial jika ditilik dari etnisitas penduduk, wilayah Kabupaten Maros adalah salah satu wilayah peralihan. Dalam artian bahwa, mayoritas jumlah penduduk antara etnis Makassar dan Bugis hampir sama banyaknya. Keberadaan etnis Makassar di Kabupaten Maros hampir mendiami sebagian wilayah pesisir, sedangkan wilayah Kabupaten Maros bagian utara adalah sebagian besar beretnis Bugis.¹⁵

Apabila ditelisik dari berbagai perspektif, kedua etnis ini tidak dapat dibedakan secara jelas baik secara fisik maupun nonfisik. Perbedaan tersebut hanya dapat dibedakan dengan melihat perbedaan dialek bahasa yang digunakan dan atas pengakuan mereka tentang asal keturunannya. Jika

¹⁵ Darwas Rasyid Mustara. *Sejarah Daerah Tingkat II Kabupaten Maros*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1990. Hlm 26.

ditanya asal keturunannya, mereka hanya mengatakan bahwa ia berasal dari Gowa atau Bone, Soppeng, Wajo, dan Sinjai.¹⁶

Pada awal abad ke-20, situasi sosial di wilayah ini, terutama di kalangan masyarakat pribumi, tidak stabil. Hal ini terjadi karena pemerintah kolonial Belanda terlibat dalam pengambilan keputusan di berbagai wilayah kekayaan, yang menyebabkan konflik yang banyak terjadi, baik antara elit maupun antar wilayah, terutama dalam konteks politik. Setiap kepala daerah atau wilayah berusaha untuk saling bersaing dalam pengaruh dan dukungan. Dalam upaya bersaing untuk mengendalikan sumber daya, para penguasa lokal, yang sering disebut "Karaeng", berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kebijakan-kebijakan seperti peningkatan infrastruktur transportasi, penyediaan sarana pendidikan, pertanian, dan hasilnya pertamanya digunakan untuk membangun dan memperkuat struktur kekuasaan, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpuasan yang meluas.¹⁷

Kondisi sosial di Kabupaten Maros juga dipengaruhi berdasarkan sistem kekerabatan, stratifikasi sosialnya dan mata pencaharian penduduk setempat. Masyarakat Bugis-Makassar di Kabupaten Maros menganut sistem kekerabatan yang bersifat bilateral. Untuk mematuhi prinsip bilateral ini, hubungan keluarga setiap individu dapat dilacak melalui dua jalur, baik

¹⁶ *Wawancara*, Asdar (53 Tahun) di kediamannya Dusun Kanjitongan, Desa Mattirotasi, Kec. Maros Baru pada tanggal 5 Mei 2023.

¹⁷ Simon Sirua Sarapang dan Muslimin A.R. Effendi. *Onderafdeeling Maros; Konfigurasi Elit dan Kontestasi Kekuasaan 1900-1946*. Makassar. Pustaka Sawerigading, 2016.

melalui garis keturunan ayah maupun ibu. Kelompok-kelompok keluarga terbentuk melalui jalur kelahiran dan perkawinan.¹⁸

"dalam bahasa daerah Makassar, istilah kerabat disebut 'bija'. Bija sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu Bija Pamakkang dan Bija Passaribattangang. Bija Pamakkang merujuk pada kelompok-kelompok kekerabatan yang terbentuk melalui dua jalur kelahiran, sedangkan Bija Passaribattangang terbentuk melalui dua jalur perkawinan."¹⁹

Kelompok kekerabatan dalam unit sosial terkecil disebut sebagai bija pamakkang sibatu ballak, atau yang lebih dikenal sebagai rumah tangga. Definisi ini mencakup anggota keluarga inti dan semua kerabat yang tinggal bersama dalam satu unit rumah tangga. Konsep ini memiliki implikasi sosial bahwa setiap individu dalam rumah tangga merupakan kesatuan sosial, budaya, ekonomi, dan religius. Jadi, jika salah satu rumah tangga mengalami masalah atau musibah, terutama yang berhubungan dengan urusan internal, semua anggota rumah tangga yang terlibat memiliki kewajiban untuk memulihkan kembali integritas keluarga mereka. Bahkan kerabat yang jauh juga bertanggung jawab untuk bersama-sama dengan kerabat lainnya dalam menjaga dan membela kehormatan keluarganya.²⁰

Klasifikasi sistem stratifikasi sosial yang ada di Kabupaten Maros bagi suku Makassar, mereka mengenal tiga lapisan sosial, tingkatan tertinggi

¹⁸ *Wawancara*, Asdar (53 Tahun) di kediamannya Dusun Kanjitongan, Desa Mattirotasi, Kec. Maros Baru pada tanggal 5 Mei 2023.

¹⁹ *Wawancara*, Asdar (53 Tahun) di kediamannya Dusun Kanjitongan, Desa Mattirotasi, Kec. Maros Baru pada tanggal 5 Mei 2023.

²⁰ *Wawancara*, Asdar (53 Tahun) di kediamannya Dusun Kanjitongan, Desa Mattirotasi, Kec. Maros Baru pada tanggal 5 Mei 2023.

disebut *bija karaeng*, yang merupakan golongan bangsawan. Golongan menengah terdiri dari orang awam yang disebut *tu samarak*, sedangkan golongan terendah adalah *hamba sahaya* atau *budak belian*.

Dalam konteks sosial masyarakat Kabupaten Maros, pada masa kejayaan tradisi kerajaan, kekuasaan dikuasai oleh kaum bangsawan. Pemerintahan dikendalikan oleh kelompok raja dan kerabatnya. Oleh karena itu, sulit bagi individu di luar kelompok ini untuk terlibat dalam kepemimpinan tradisional tersebut atau mendapatkan jabatan. Jabatan-jabatan penting dalam birokrasi kerajaan tidak ditentukan melalui seleksi yang ketat berdasarkan kemampuan rakyat, melainkan melalui pertimbangan hubungan kekeluargaan yang masih relevan hingga era kemerdekaan.

Kondisi aspek sosial di Maros tentu mengalami perubahan, baik dari segi stratifikasi, sistem kepemilikan individu maupun kelompok dan sistem kekerabatan sesuai dengan perkembangan zaman. Semua aspek kondisi sosial tersebut juga berorientasi pada mata pencaharian suatu individu atau kelompok. Bagi masyarakat yang bertenis Bugis-Makassar yang menghuni wilayah Kabupaten Dati II Maros perbedaan penduduk atau kedudukan dan derajat itu pun sampai di masa kini masih dapat kita temukan lagi, seperti sapaan Puang (Bugis) atau Karaeng (Makassar) dari seorang yang ditujukan kepada orang lain yang dianggap mempunyai asal keturunan bangsawan.²¹

²¹ Darwas Rasyid Mustara. *Op.Cit.* Hlm 27.

Namun kenyataannya pula perbedaan kedudukan dan derajat inipun nampak sudah tidak terlalu tajam lagi sebagaimana di masa-masa lampau, seperti perbedaan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan atau jabatan dalam pemerintahan sudah tidak tidak dijumpai lagi. Hingga pada tahun 1990-an, bahwa dari strata sosial terbawah (hamba) sering terjadi perkawinan dengan strata teratas (bangsawan/keturunan raja) bila mempunyai jabatan atau karena pendidikan yang tinggi.²²

2.3. Kondisi Ekonomi

Umumnya, sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Dati II Maros mencari nafkah dari sektor pertanian dan perikanan, mencapai 80%, sekitar 7% menjadi pedagang, 5% menjadi pegawai negeri, dan 8% lainnya terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan seperti buruh. Hasil utama dari sektor ini adalah beras, jagung, dan ikan. Pendapatan lain diperoleh dari hasil tambahan seperti kacang tanah, ubi kayu, serta aktivitas beternak kerbau dan unggas seperti itik dan ayam.²³ Berdasarkan aspek kondisi ekonominya, sebagian besar penduduk Kabupaten Maros bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, dan nelayan. Jika dilihat dari segi geografisnya, jelas terlihat bahwa sumber ekonomi penduduk Maros adalah hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan hutan. Pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1930-1940, luas lahan pertanian di Maros mencapai 37.000

²² *Ibid.*

²³ Darwas Rasyid Mustara. *Ibid.* Hlm 18.

Acre.²⁴ Di Maros, sudah ada pabrik penggilingan padi, saluran irigasi yang memadai untuk pertanian, dan masyarakat juga memiliki organisasi perdagangan bernama "Perkoempoelan Pedagang Hidoep Maros". Organisasi ini didirikan oleh perwakilan rakyat, Perkoempoelan Pedagang Tiong Hwa, dan ada juga federasi di Camba.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Maros berstatus sebagai wilayah jajahan yang dikuasai dengan baik, masyarakat Maros tidak hanya bergantung pada penjualan langsung kepada pemerintah (hubungan vertikal), tetapi mereka juga memiliki kesempatan untuk berdagang dengan sesama masyarakat (hubungan horizontal) selain pemerintah, yang membuat mereka lebih dinamis.

W.G. Van Der Wolk, dalam laporannya setelah meninggalkan posisi sebagai *controlleur onderafdeeling*, menjelaskan perbedaan mengenai keadaan pertanian di masyarakat Maros. Menurutnya, kesan yang menarik saat melihat lahan pertanian yang luas dan hijau di Maros sebenarnya tidak benar. Kita perlu memperhatikan dengan cermat bahwa kondisi persawahan tersebut buruk dan tidak terawat. Gulma mendominasi lahan tersebut, pengairan yang tidak memadai, dan bahkan bergantung pada hujan. Sistem kepemilikan tanah juga dikuasai oleh segelintir orang, sehingga lebih banyak

²⁴ Special report: Allied Geograpichal Saction, SWPA Special Report No. 80. Makassar SW Celebes.

²⁵ *Kort Apercu Betreffende de Onderafdeeling Maros*. hlm 6.

pekerja yang terlibat. Ketidakteraturan dalam penanaman ini dapat menyebabkan kegagalan panen.²⁶

Maros telah menjadi salah satu lumbung padi di bawah kekuasaan Makassar bahkan sebelum jatuh di bawah kendali Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC). Pada tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda menginstruksikan para bupati dan pemimpin tradisional di subdistrik ini untuk mendirikan lumbung-lumbung padi. Instruksi ini terkait dengan panen yang melimpah baru-baru ini di daerah tersebut dan pasokan pangan yang cukup yang dimiliki oleh penduduk setempat.

Pemerintah Hindia Belanda bertujuan untuk menghadapi potensi kegagalan panen akibat cuaca buruk di masa depan. Dalam prakteknya, upaya ini terbukti efektif ketika pada April 1904, setelah benih padi ditanam dan panen diharapkan, musim kering datang dan mengakibatkan gagalnya panen. Berangkat dari peristiwa tersebut, untuk mengantisipasi kekurangan stok beras, maka para bupati dan kepala pribumi memerintahkan kepada masyarakat untuk mendirikan dua lumbung padi, yakni distrik Turikale dan satu lagi berada di distrik Barandasi.²⁷

Kondisi ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar D.I. Bantimurung juga banyak dipengaruhi oleh kondisi demografi. Pada tahun

²⁶ Laporan serah terima dari W.G. Van Der Wolk, Controlleur Onderafdeeling Maros. Hlm 142-143.

²⁷ Nahdia Nur, *Produksi dan Pemasaran Beras di Sulawesi Selatan 1900-1943*. (Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana Program Studi Sejarah Jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora Universitas Gadjah Mada, 2003). Hlm 73.

1970 jumlah penduduk yang tinggal di sekitar D.I. Bantimurung yakni Kecamatan Maros Baru dan Kecamatan Bantimurung adalah sebanyak 100.859 jiwa.²⁸ Keadaan penduduk yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani juga membawa dampak pada tingkat hasil produktivitas pertanian.

Dalam wilayah kabupaten Dati II Maros, terdapat luas total area pertanian mencakup 21.639,12 hektar untuk persawahan, 24.685,98 hektar untuk lahan kering, 4.615,55 hektar untuk tambak, serta 32.600 hektar untuk hutan.²⁹ Setidaknya sampai pada tahun 1970-an, corak sistem pertanian di Kabupaten Maros masih mengandalkan sistem sawah tadah hujan. Hal tersebut membuat beberapa jaringan irigasi teknis dan semi teknis kurang efisien digunakan, sehingga mempengaruhi hasil produktivitas tanaman. Berikut ini adalah tabel lengkap mengenai data luasan lahan pertanian yang berpengairan sebelum dilaksanakannya pilot proyek pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi:

Tabel 2.3. Luas areal sawah (ha) pada masing-masing kecamatan dalam Kabupaten Dati II Maros

No.	Kecamatan	Berpengairan			Tadah Hujan	Jumlah
		Teknis	Semi Teknis	Sederhana (Desa)		
1.	Mandai	0.00	0.00	800,00	3.553,93	4.359,93
2.	Bantimurung	1.425,50	845,00	1.550,00	2.696,76	6.517,26

²⁸ Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, *Sulawesi Selatan Dalam Angka 1970*.

²⁹ Darwas Rasyid Mustara. *Op.Cit.* Hlm 18.

3.	Camba	0.00	0.00	3.480,00	337,33	3.817,33
4.	Maros Baru	3.246,50	0.00	0.00	3.326,10	6.590,60
Jumlah		5.050,00	845,00	5.830,00	9.914,12	21.639,12

Sumber: Darwas Rasyid Mustara. *Sejarah Daerah Tingkat II Kabupaten Maros*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1990. Hlm 18.

Khusus untuk warga yang berada di Kabupaten Dati II Maros, fenomena alam seperti musim hujan terjadi setiap tahunnya pada akhir tahun, yakni dari bulan Oktober hingga Maret. Pada bulan-bulan ini, terutama Desember dan Januari (1981/1982), curah hujan mencapai puncaknya dengan jumlah tertinggi sekitar 785-626 mm. Oleh karena itu, pada periode ini, para petani di wilayah Kabupaten Maros menjalankan aktivitas bercocok tanam dengan menanam padi varietas musim hujan. Setelah periode ini berakhir, yaitu pada musim kemarau yang terjadi antara bulan April hingga September, proses bercocok tanam dilanjutkan dengan menanam padi varietas kemarau di lahan pertanian yang mendapat pasokan air melalui sistem irigasi. Dengan pola seperti ini, para petani di wilayah ini mengenal dua kali masa penanaman dalam setahun, yaitu musim tanam pada musim hujan (Oktober-Maret) dan musim tanam pada musim kemarau (April-September).³⁰

Kondisi ekonomi masyarakat petani juga ditentukan berdasarkan tingkat hasil produktivitas tanamannya per tahun. Jumlah produksi padi tersebut ditentukan berdasarkan musim tanamnya. Berikut ini adalah tabel perbedaan tingkat hasil produksi padi musim pada musim tanam rendengan dan musim tanam gadu:

³⁰ Darwas Rasyid Mustara, *Ibid.* Hlm 19.

Tabel 2.4. Tingkat hasil produktivitas tanaman padi di Maros

No.	Musim Tanam	Tahun					
		1965	1966	1967	1968	1969	1970
1.	Rendengan	51.876	38.106	44.042	68.801	67.641	63.392
2.	Gadu	3.190	2.375	1.675	2.701	2.465	2.500

Sumber: Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, *Sulawesi Selatan Dalam Angka 1970*.

Tabel di atas menunjukkan hasil produksi tanaman padi sawah di Kabupaten Maros dari tahun 1965 hingga 1970. Periode ini mencerminkan hasil produksi berdasarkan musim tanam yang berbeda. Musim tanam rendengan mengacu pada musim penghujan di mana petani mengandalkan sawah tadah hujan untuk meningkatkan hasil produksi. Luas lahan panen selama enam tahun periode ini mencapai 110.466 hektar, dengan total hasil produksi mencapai 333.858 ton. Rata-rata persentase pendapatan dalam enam tahun tersebut mencapai 22%. Namun, pada musim gadu, hasil produksi mengalami penurunan yang signifikan. Selama periode 1965-1970, total produksi padi sawah hanya mencapai 14.906 ton dengan luas lahan panen seluas 14.906 hektar, dan persentase pendapatan rata-rata dalam enam tahun tersebut adalah 21%.³¹

Mata pencaharian masyarakat petani sawah, yang ditentukan oleh hasil produksi pertanian selama satu tahun, tergantung pada kondisi ekonomi

³¹ Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, *Sulawesi Selatan Dalam Angka 1970*.

mereka. Pada tahun 1970, pola tanam dan luas areal tanam terpengaruh oleh musim gadu dan masuknya musim kemarau, yang mengakibatkan menurunnya hasil produksi. Penurunan tersebut disebabkan oleh keterbatasan pasokan air dan efisiensi rendah dari sistem saluran irigasi yang digunakan oleh masyarakat pada saat itu untuk mengairi lahan persawahan.

Oleh karena itu, guna mengatasi kekurangan pasokan air selama musim kemarau, langkah pertama yang diambil adalah memperluas dan merehabilitasi jaringan irigasi. Pada sekitar tahun 1972, luas lahan sawah yang mendapatkan irigasi di Kabupaten Maros mencapai 4.736 ha. Rincian luas tersebut terdiri dari wilayah dengan irigasi teknis seluas 3.700 ha, irigasi setengah teknis seluas 200 ha, dan irigasi sederhana seluas 836 ha.³²

Sebelum proyek eksploitasi pemeliharaan irigasi dilaksanakan pada tahun 1976-1977, masyarakat petani di Maros sangat mengandalkan sistem sawah tadah hujan. Pada tahun 1972, luas sawah tadah hujan di Kabupaten Maros mencapai 17.614 ha, sementara luas daerah yang menggunakan pengairan teknis melalui sistem irigasi hanya mencapai 1.504 ha.³³ Fakta ini membuktikan bahwa hasil produksi tanaman padi, terutama pada musim rendengan atau musim penghujan, meningkat secara signifikan karena

³² Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, *Sulawesi Selatan Dalam Angka 1972*.

³³ Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. *Ibid*, hlm 192.

pasokan air di sistem sawah tadah hujan sudah mencukupi (seperti terlihat pada tabel 2.3).